BAB IV

ANALISIS ENTERPRISE

4.1. Inisiasi Perencanaan

Sebagai tahap awal dari metodologi EAP, inisiasi perencanaan mendefinisikan organisasi sebagai objek penelitian terkait dengan visi dari model sistem informasi, ruang lingkup dan sasaran, dengan harapan agar pengembangan EA yang dilakukan sesuai dengan *core business* yang dijalani oleh organisasi. Berikut ini adalah tahapan-tahapan yang dilakukan pada fase inisiasi perencanaan, yaitu:

1) Pendefinisian ruang lingkup dan sasaran pengerjaan EAP;
2) Pendefinisian visi;
3) Pemilihan pendekatan metodologi perencanaan;

4.1.1. Pendefinisian Ruang Lingkup dan Sasaran Pengerjaan EAP

Pendefinisian ruang lingkup pengerjaan EAP didasarkan pada ruang lingkup penelitian yaitu Fungsi Bisnis Pengadaan PNSD, Pendidikan dan Pelatihan dan Pengangkatan CPNSD menjadi PNSD di BKD Kota Bandung dan menghasilkan suatu model EA terdiri dari model data, aplikasi dan teknologi. Untuk lebih jelasnya mengenai fungsi bisnis tersebut bisa dilihat di Bagan Hierarki Fungsi Bisnis BKD Kota Bandung.Dengan demikian maka sasaran sistem informasi dari EAP yang dibuat adalah sistem informasi yang memiliki arsitektur data, aplikasi dan teknologi yang selaras dengan fungsi bisnis tersebut.

4.1.2. Pendefinisian Visi

Definisi visi dari Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2009 – 2013 adalah "Badan Kepegawaian Daerah sebagai Lembaga Aparatur yang Adaptif, Inovatif, dan Akomodatif".

Visi dari pengembangan Sistem Informasi haruslah dapat menunjang pencapaian visi organisasi. Oleh karena itu visi pengembangan Sistem Informasi diformulasikan sebagai berikut: "Membangun sistem informasi terintegrasi yang didukung oleh teknologi informasi dengan tujuan menunjang fungsi bisnis utama BKD Kota Bandung dalam bidang kepegawaian".

4.1.3. Pemilihan Pendekatan Metodologi Perencanaan

Berdasarkan metode penelitian dalam Pemodelan Arsitektur *Enterprise* di BKD Kota Bandung, penelitian ini terdiri dari metodologi EAP yang terdiri dari empat tahapan :

1) Inisiasi Perencanaan;
2) Model bisnis dan sistem saat ini dan teknologi;
3) Arsitektur data, Arsitektur Aplikasi dan Aplikasi Teknologi;
4) Rencana Implemensi.

4.2. Pemodelan Bisnis

Model bisnis mendefinisikan bisnis dari suatu organisasi yang menjelaskan dan menggambarkan fungsi-fungsi bisnis organisasi tersebut yang dapat diuraikan menjadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan organisasi. Fungsi-fungsi bisnis dapat dibagi ke dalam subfungsi-subfungsi sehingga membentuk struktur pohon yang

secara sederhana dapat ditampilkan dengan menggunakan daftar secara indentasi yang menunjukkan setiap tingkatan sampai ke tingkat detilnya.

Pada tahap pengembangan model bisnis ini, tahapan yang akan dilakukan adalah:

1) Dokumentasi struktur organisasi, dan
2) Mengidentifikasi dan mendefinisikan fungi-fungsi bisnis.

4.2.1. Dokumentasi Struktur Organisasi

Untuk mencapai visinya, maka hal ini harus mendapat dukungan dari segenap fungsi-fungsi bisnis yang ada seperti fungsi Bidang perencanaan dan kesejahteraan Pegawai, Bidang Pengembangan Karier Pegawai, Bidang Mutasi Pegawai dan Bidang Pendidikan dan Pelatihan. Secara lengkap Struktur Organisasi BKD Kota Bandung dapat dilihat pada Gambar III-1.

4.2.2. Identifikasi dan Definisi Fungsi Bisnis BKD Kota Bandung

Fungsi merupakan sekumpulan aktivitas yang dilakukan dalam bisnis dan fungsi didefinisikan berdasarkan bagian-bagiannya. Definisi fungsi bisnis hanyalah didasarkan pada aksi-aksi yang dilakukan, bukan pada organisasinya maupun orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu fungsi. Untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan fungsi bisnis yang terdapat di BKD Kota Bandung, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah:

1) Mendefinisikan area-area fungsional utama menggunakan konsep Value Chain Michael Porter;
2) Memecah/mendekomposisikan tiap area fungsional menjadi sub fungsi sampai

fungsi tersebut menjadi single action, dapat dilakukan berulang-ulang, memiliki *outcome* dan dapat dikaitkan dengan unit organisasi tertentu menggunakan Bagan Hierarki Fungsi Bisnis;

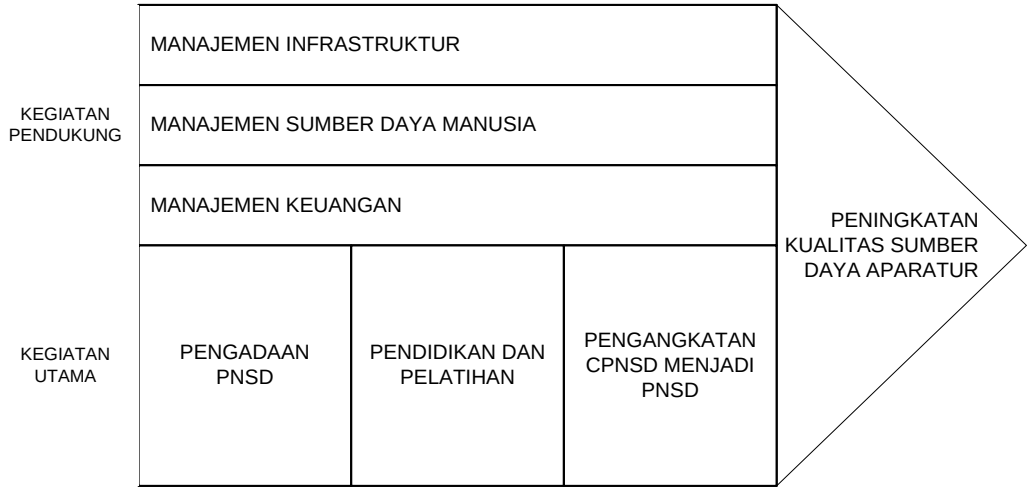
3) Membuat relasi antara fungsi-fungsi yang telah terinci dengan unit-unit organisasi yang melaksanakannya dalam bentuk matriks.

4.2.2.1. Identifikasi Area-Area Fungsional Utama

Sesuai misi BKD Kota Bandung berupa Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian yang transparan dan akuntabel, Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur, Penyajian data kepegawaian yang apresiatif serta Pembangunan dan Pengembangan Model *Assesment Centre* dalam rangka penempatan dalam jabatan struktural dan fungsional, maka aktivitas utama di BKD Kota Bandung dikelompokan pada misi tersebut. Dalam tesis ini difokuskan pada kajian Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur yaitu Pengadaan PNSD, Pendidikan dan Pelatihan dan Pengangkatan CPNSD menjadi PNSD karena dalam kegiatan EAP dimulai dengan pertanyaan “Bisnis apa yang dilakukan organisasi?” dan bukan “Sistem apa yang diperlukan eksekutif organisasi?” sehingga ruang lingkup pengerjaan EAP harus sesuai dengan bisnis yang dilakukan di BKD Kota Bandung.

Berdasarkan konsep rantai nilai *Michael Porter*, area fungsional utama model Kepegawaian di BKD Kota Bandung dapat dikelompokkan ke dalam kegiatan utama (*Primary Activities*) dan kegiatan pendukung (*Support Activities*). Kegiatan utama terdiri dari Penerimaan PNS, Operasional Kepegawaian dan

Pengangkatan CPNS menjadi PNS. Sedangkan kegiatan pendukung terdiri dari kegiatan yang berhubungan dengan Infrastruktur Perusahaan, Manajemen Sumber Daya Manusia dan Manajemen Keuangan. Pada gambar IV-2 memperlihatkan rantai nilai untuk model Kepegawaian di BKD Kota Bandung.



Gambar IV-1 Rantai Nilai Model Kepegawaian

Masing-masing kegiatan utama dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) dideskripsikan sebagai kegiatan untuk perekrutan CPNSD;
2) Operasional Kepegawaian merupakan aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan proses pelatihan dan pendidikan selama menjadi CPNSD;
3) Pengangkatan CPNSD menjadi PNSD adalah aktivitas yang berkaitan dengan masa percobaan selama menjadi calon pegawai negeri sipil.

Kegiatan pendukung dapat dijelaskan seperti dibawah ini:

1) Manajemen Sumber daya manusia adalah kegiatan pendukung untuk penentuan kebutuhan, pemantauan dan alokasi sumber daya manusia pada kegiatan pengadaan PNSD, Operasional kepegawaian dan Pangangkatan

CPNSD menjadi PNSD;

2) Manajemen Keuangan adalah kegiatan pendukung yang berkaitan dengan usaha untuk memberikan dukungan manajemen keuangan pada alokasi biaya penyelenggaraan pengadaan PNS.
3) Manajemen Infrastruktur adalah kegiatan pendukung yang dimulai dari perencanaan kebutuhan fasilitas dan perlengkapan serta pengelolaannya untuk mendukung kegiatan kepegawaian.

Dalam menjalankan kegiatan bisnis berdasarkan kegiatan utama dan pendukung seperti diatas, BKD Kota Bandung diharapkan mendapat suatu keuntungan yaitu Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur melalui kinerja yang efektif dan efisien yang bergantung pada kemampuan untuk mengatur keterkaitan antar semua aktivitas di dalam rantai nilai tersebut. Keterkaitan ini dapat berupa arus informasi, barang-barang dan jasa serta sistem dan prosedur untuk menjalankan aktifitas.

4.2.2.2. Bagan Hierarki Fungsi Bisnis BKD Kota Bandung

Setelah melakukan inisiasi terhadap area fungsi bisnis organisasi dengan pemanfaatan *value chain* maka hal berikut yang akan dilakukan adalah menyusun struktur dekomposisi fungsi bisnis dengan menggunakan bagan hierarki fungsi.

Sesuai model rantai nilai pada gambar IV-1 kegiatan dibagi kedalam 2 (dua) bagian yaitu kegiatan utama dan pendukung, yang termasuk pada kegiatan utama terdiri dari Pengadaan PNSD, Pendidikan dan Pelatihan serta Pengangkatan CPNSD menjadi PNSD sedangkan yang termasuk pada kegiatan pendukung

adalah manajemen infrastruktur, manajemen sumber daya manusia dan manajemen keuangan, maka fungsi yang akan didekomposisikan adalah kegiatan yang berkaitan dengan kedua kegiatan tersebut. Penjelasannya sebagai berikut:

1. Pengadaan PNSD

1.1. Inventarisasi Lowongan Jabatan dalam Formasi yang telah ditetapkan dan syarat jabatannya;

1.2. Menetapkan Usulan Kebutuhan Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah;

1.3. Menyampaikan Usulan Kebutuhan Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara melalui Gubernur;

1.4. Penetapan Jumlah Formasi Pegawai Negeri Sipil;

1.5. Pengumuman Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah;

1.6. Pembentukan Panitia Ujian Seleksi PNSD;

1.7. Pemeriksaan Berkas Persyaratan Adminsitratif;

1.8. Penerimaan Berkas lamaran PNS;

a. Berkas lamaran Tidak Memenuhi Persyaratan dikembalikan kepada pelamar;

b. Berkas Lamaran Memenuhi Persyaratan disusun untuk dibuatkan Nomor Ujian.

1.9. Pengumuman dan Penyampaian Nomor Ujian Saringan Pengadaan PNS;

1.10. Pelaksanaan Ujian Seleksi Pengadaan PNS;

1.11. Pemeriksaan Hasil Ujian Seleksi Pengadaan PNS;

1.12. Pengumuman Kelulusan Ujian Seleksi Pengadaan PNS;

1.13. Penerimaan Berkas Peserta lulus Seleksi Pengadaan PNS;

1.14. Pengiriman Berkas Peserta Peserta PNS;

1.15. Pemberian Nomor Induk Pegawai;

1.16. Penyusunan Draft Keputusan Walikota tentang Pengangkatan CPNSD;

1.17. Penandatanganan Keputusan Walikota tentang Pengangkatan CPNSD;
1.18. Penandatanganan Salinan keputusan Walikota tentang Pengangkatan CPNSD;
1.19. Penandatanganan Petikan keputusan Walikota tentang Pengangkatan CPNSD;
1.20. Penyerahan Petikan Keputusan Walikota tentang Pengangkatan CPNSD.

2. Pendidikan dan Pelatihan

2.1. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Prajabatan
2.1.1. Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Diklat;
2.1.2. Pembuatan Surat Edaran Pendaftaran Peserta Diklat;
2.1.3. Pengiriman Surat Edaran Pendaftaran;
2.1.4. Pengiriman Berkas calon Peserta Diklat;
2.1.5. Pembuatan Surat Perintah;
2.1.6. Penandatanganan Surat Perintah;
2.1.7. Pengiriman Surat Perintah (SP) Peserta Diklat melalui SKPD;
2.1.8. Penyampaian Surat Perintah Mengikuti Diklat kepada peserta;
2.1.9. Pengiriman Peserta Diklat ke Lembaga Diklat lain;
2.1.10. Pelaksanaan Diklat di Lembaga Diklat Lain;
2.1.11. Pelaksanaan Diklat secara Swakelola;
2.1.12. Evaluasi dan Pelaporan.

3. Pengangkatan CPNSD menjadi PNSD

3.1. Badan Kepegawaian Daerah mengeluarkan surat edaran pada organisasi perangkat daerah yang ditempati calon pegawai negeri sipil yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Prajabatan untuk mengumpulkan berkas persyaratan pengajuan pengangkatan pegawai negeri sipil serta jadwal pelaksanakaan uji kesehatan;

3.2. Pengelola kepegawaian organisasi perangkat daerah yang ditempati calon pegawai negeri sipil mengkoordinir pengumpulan dan verifikasi awal kelengkapan berkas serta mengirimkan data tersebut setelah ditandangani oleh kepala organisasi;

3.3. Badan Kepegawaian Daerah melakukan verifikasi berkas;

3.4. Pelaksanaan uji kesehatan;

3.5. Pengajuan draft keputusan kepada Walikota untuk dimintakan persetujuan;

3.6. Mengirimkan berkas pengangkatan ke Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara untuk dimintaikan pertimbangan teknis pengangkatannya;

3.7. Penerbitan surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapatkan persetujuan teknis BKN.

4. Manajemen Infrastruktur

4.1. Perencanaan kebutuhan infrastruktur;

4.1.1. Inventarisasi kebutuhan infrastruktur;

4.1.2. Penetapan kebutuhan infrastruktur;

4.1.3. Penetapan anggaran infrastruktur;

4.1.4. Pengadaan infrastruktur dengan pihak ketiga;

4.2. Pengelolaan infrastruktur perusahaan

4.2.1. Pengalokasian anggaran perawatan infrastruktur

4.2.2. Perawatan berkala infrastruktur;

5. Manajemen Sumber Daya Manusia

5.1. Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

5.1.1. Penetapan kebijakan Manajemen Rekruitmen

5.1.2. Penetapan kebijakan Administrasi SDM;

5.1.3. Penetapan Pembelanjaan Pegawai.

5.2. Manajemen Personil;

5.2.1. Perencanaan kebutuhan personil;

5.2.2. Pengelolaan Perkrutan Kerja;
5.2.3. Pengelolaan Data Personal;
5.3. Pengelolaan Pembayaran Personil;
5.3.1. Perhitungan Gaji;
5.3.2. Perhitungan Cuti;
5.3.3. Perhitungan Honor.
5.4. Evaluasi Prestasi Personil
6. Manajemen Keuangan
6.1. Penetapan Anggaran;
6.1.1. Penyusunan Anggaran Rutin;
6.1.2. Pengesahan Anggaran.
6.2. Pengalokasian Anggaran;
6.3. Pemantauan dan Evaluasi Anggaran;
6.4. Revisi Anggaran;
6.5. Pelaporan Keuangan.

4.2.2.3. Relasi Antara Fungsi-fungsi Bisnis dengan Unit-unit Organisasi

Analisis rantai nilai mendeskripsikan fungsi-fungsi yang dijalankan *enterprise* namun kurang dapat dipahami oleh pelaku organisasi karena dianggap berbeda dengan deskripsi kerja dari unit organisasi yang dimiliki karena analisis rantai nilai menekankan pada *cross function*. Agar model bisnis dapat dipahami dengan baik maka fungsi-fungsi bisnis yang telah terdefinisi dapat dihubungkan dengan unit organisasi dalam bentuk matriks. Matriks fungsi bisnis dengan unit organisasi mengilustrasikan siapa pembuat keputusan untuk setiap proses.

Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada Tabel IV-1

Tabel IV-1 Matriks Fungsi Pengadaan PNSD dengan Organisasi BKD Kota Bandung

ORGANISASI / FUNGSI	KEPALA BKD	SEKRETARIAT		BIDANG PERENCANAAN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI		BIDANG PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI		BIDANG MUTASI PEGAWAI		BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
		SUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN	SUBBAG KEUANGAN & PROGRAM	SUBBID PERENCANAAN KEPEGAWAIAN & INFORMASI DATA	SUBBID KESEJAHTERAAN PEGAWAI	SUBBID ANALISA PENGEMBANGAN KARIER	SUBBID ANALISA KOMPETENSI & PENEMPATAN	SUBBID MUTASI PEGAWAI FUNGSIONAL	SUBBID MUTASI PEGAWAI STRUKTURAL & NON STRUKTURAL	SUBBID PERENCANAAN DIKLAT	SUBBID PELAKSANAAN DIKLAT
PENGADAAN PNSD											
Inventarisasi Lowongan Jabatan dalam Formasi	■	/	/	X				X	X		
Penetapan Usulan Kebutuhan Formasi PNSD											
Penyampaian Usulan Kebutuhan Formasi PNSD											
Penetapan Formasi PNSD											
Pembentukan Panitia Ujian Seleksi PNSD											
Penerimaan Berkas lamaran PNSD	■	/	/								
Pemeriksaan Berkas Persyaratan Adminsitratif											
Pengembalian Berkas Lamaran yang tidak memenuhi syarat								X	X		
Pengumuman & Penyampaian Nomor Ujian Seleksi Pengadaan PNSD											
Pelaksanaan Ujian Seleksi Pengadaan PNSD											
Pemeriksaan Hasil Ujian Seleksi Pengadaan PNSD											
Pengumuman Kelulusan Ujian Seleksi PNSD											
Pemberkasan Peserta lulus Seleksi PNSD	■	/	/								
Pemberian Nomor Induk Pegawai											
Penyusunan Draft Keputusan Walikota tentang Pengangkatan CPNSD											
Penandatanganan keputusan Walikota tentang Pengangkatan CPNSD											
Penandatanganan Salinan keputusan Walikota tentang Pengangkatan CPNSD											
Penandatanganan Petikan keputusan Walikota tentang Pengangkatan CPNSD	■	/	/								
Penyerahan Petikan Keputusan Walikota tentang Pengangkatan CPNSD											

Keterangan :

■ Bertanggung jawab besar dan pembuat keputusan X Terlibat penuh dalam proses / Terlibat sebagian

Tabel IV-2 Matriks Fungsi Pendidikan dan Pelatihan dengan Organisasi BKD Kota Bandung

ORGANISASI / FUNGSI	KEPALA BKD	SEKRETARIAT		BIDANG PERENCANAAN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI		BIDANG PENGEMBANGAN KAREIR PEGAWAI		BIDANG MUTASI PEGAWAI		BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
		SUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN	SUBBAG KEUANGAN & PROGRAM	SUBBID PERENCANAAN KEPEGAWAIAN & INFORMASI DATA	SUBBID KESEJAHTERAAN PEGAWAI	SUBBID ANALISA PENGEMBANGAN KARIER	SUBBID ANALISA KOMPETENSI & PENEMPATAN	SUBBID MUTASI PEGAWAI FUNGSIONAL	SUBBID MUTASI PEGAWAI STRUKTURAL & NON STRUKTURAL	SUBBID PERENCANAAN DIKLAT	SUBBID PELAKSANAAN DIKLAT
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN											
Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Diklat	■	/	/							X	X
Surat Edaran Pendaftaran Peserta Diklat	X	/	/								
Pengiriman Surat Edaran Peserta Diklat											
Pengiriman Berkas calon Peserta Diklat											
Pembuatan Surat Perintah	X	/	/								
Pengiriman Surat Perintah (SP) Peserta Diklat Melalui SKPD											
Penyampaian Surat Perintah Mengikuti Diklat kepada Peserta										/	/
Pengiriman Peserta Diklat ke Lembaga Diklat Lain										/	/
Pelaksanaan Diklat di Lembaga Diklat Lain										X	X
Pelaksanaan Diklat secara Swakelola										■	■
Evaluasi dan Pelaporan	X	/	/								

Keterangan :

■ Bertanggung jawab besar dan pembuat keputusan X Terlibat penuh dalam proses / Terlibat sebagian

Tabel IV-3 Matriks Fungsi Pengangkatan CPNSD menjadi PNSD dengan Organisasi BKD Kota Bandung

ORGANISASI / FUNGSI	KEPALA BKD	SEKRETARIAT		BIDANG PERENCANAAN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI		BIDANG PENGEMBANGAN KAREIR PEGAWAI		BIDANG MUTASI PEGAWAI		BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
		SUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN	SUBBAG KEUANGAN & PROGRAM	SUBBID PERENCANAAN KEPEGAWAIAN & INFORMASI DATA	SUBBID KESEJAHTERAAN PEGAWAI	SUBBID ANALISA PENGEMBANGAN KARIER	SUBBID ANALISA KOMPETENSI & PENEMPATAN	SUBBID MUTASI PEGAWAI FUNGSIONAL	SUBBID MUTASI PEGAWAI STRUKTURAL & NON STRUKTURAL	SUBBID PERENCANAAN DIKLAT	SUBBID PELAKSANAAN DIKLAT
PENGANGKATAN CPNSD MENJADI PNSD											
Membuat Surat Edaran proses pengajuan pengangkatan CPNS menjadi PNS	■	/	/								
Pengumpulan berkas persyaratan CPNS menjadi PNS											
Verifikasi kelengkapan berkas persyaratan CPNS menjadi PNS											
Pengiriman usulan pengangkatan CPNS menjadi PNS ditandangani Kepala SKPD	X										
Pendistribusian berkas usulan CPNS menjadi PNS sesuai tupoksi								X	X		
Penelitian Berkas Persyaratan CPNS menjadi PNS											
Penandatangan Surat Pengantar Uji Kesehatan								X	X		
Pemeriksaan Kesehatan											
Penerimaan Hasil Pemeriksaan Kesehatan											
Pembuatan Konsep Surat Keputusan Pengangkatan CPNS menjadi PNS											
Penelitian dan Pemeriksaan Surat Keputusan	X	/	/					X	X		
Penandatanganan Keputusan Pengangkatan PNS											
Penandatanganan Salinan Keputusan Pengangkatan CPNS menjadi PNS											
Pemeriksaan Petikan Surat Keputusan	X	/	/								
Penandatanganan Petikan Keputusan Pengangkatan CPNS menjadi PNS											
Penyampaian Petikan Keputusan kepada ybs melalui SKPD dan instansi terkait											

Keterangan :

■ Bertanggung jawab besar dan pembuat keputusan X Terlibat penuh dalam proses / Terlibat sebagian

Matriks fungsi dan organisasi dibuat untuk perencanaan organisasi dimana setiap fungsi pada level paling detail harus dilaksanakan setidaknya oleh satu unit organisasi dan setiap posisi dalam unit organisasi harus melakukan setidaknya satu fungsi.

Keterhubungan antara fungsi dan unit organisasi di atas sangatlah penting dalam perencanaan pengembangan sistem ke depan karena dapat menjadi acuan dalam menetukan siapa atau unit organisasi mana yang benar-benar membuat dan menggunakan data serta informasi dari suatu fungsi bisnis. Orang atau unit organisasi yang paling baik dalam menyediakan informasi mengenai suatu fungsi bisnis adalah orang atau unit organisasi yang benar-benar melakukan fungsi bisnis tersebut.

4.3. Sistem dan Teknologi Saat Ini

Tujuan pada tahapan ini mendokumentasikan dan mendefinisikan seluruh *platform* sistem dan teknologi yang dimiliki, dikelola serta digunakan oleh perusahaan saat ini. Tahapan ini menghasilkan *Information Resource Catalog* (IRC) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Mempersiapkan koleksi data aplikasi dan teknologi;
2) Mengumpulkan data IRC.

4.3.1. Koleksi Data IRC

Tujuan dari tahapan ini adalah untuk menentukan macam-macam data yang disertakan dalam IRC. Langkah-langkah dalam pengumpulan data yaitu

menentukan data mengenai aplikasi bertujuan mengidentifikasi aplikasi apa saja yang telah dimiliki, dikelola serta digunakan oleh masing-masing unit organisasi di BKD Kota Bandung. Saat ini data yang dihasilkan oleh proses bisnis di BKD Kota Bandung disimpan dalam basis data aplikasi-aplikasi yang berbeda dan tidak terintegrasi. Fungsi bisnis yang telah didukung oleh aplikasi adalah fungsi Sub Bidang Perencanaan Kepegawaian dan Informasi Data, Keuangan dan Penggajian. Aplikasi-aplikasi tersebut dianggap telah mampu mendukung suatu fungsi bisnis tertentu namun tidak saling mendukung fungsi bisnis lainnya, karena tidak terhubung satu sama lain dan memiliki *platform* yang berbeda.

Aplikasi-aplikasi yang terdapat di BKD Kota Bandung saat ini terbagi 3 dalam bagian :

1) Aplikasi SIMPEG

   Aplikasi SIMPEG merupakan aplikasi yang digunakan untuk membantu pengelolaan data manajemen kepegawaian di internal BKD. Karena pengelolaan data manajemen kepegawaian dengan frekuensi yang cukup tinggi dan kuantitas yang cukup banyak.

2) Aplikasi SIMDA Keuangan

   Aplikasi ini digunakan untuk membantu pengelolaan data keuangan di internal BKD Kota Bandung.

3) Aplikasi Sistem Informasi Penggajian

   Aplikasi ini digunakan untuk membantu pengelolaan data penggajian di internal BKD Kota Bandung.

Dokumentasi aplikasi tersebut didefinisikan secara lengkap dan menjadi katalog yang mendeskripsikan aplikasi, pengelola dan penggunaan aplikasi yang disajikan dalam *information Resources Catalog* (IRC) berikut ini:

Tabel IV-4 IRC Aplikasi SIMPEG

Nama	Aplikasi SIMPEG
Nama Lengkap	Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
Kategori	Layanan akses informasi kepegawaian
Penanggung Jawab/Pengelola	Kepala Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Pegawai
Unit pengguna	Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Pegawai
Deskripsi	Digunakan untuk membantu pengelolaan data manajemen kepegawaian di internal BKD.
Status operasional	Operasional
Waktu Penggunaan	Jam kerja (Senin-Jumat)
Mulai implementasi	2009
Perangkat lunak	PHP, PostgreSQL
Perangkat keras	PC Standar (Intel)
Network	LAN, WAN, RJ 45, UTP cable
Isu Jangka Panjang	Integrasi dengan aplikasi penggajian akan memudahkan pengelolaan data penggajian pegawai BKD Kota Bandung.

Tabel IV-5 IRC Aplikasi SIMDA Keuangan

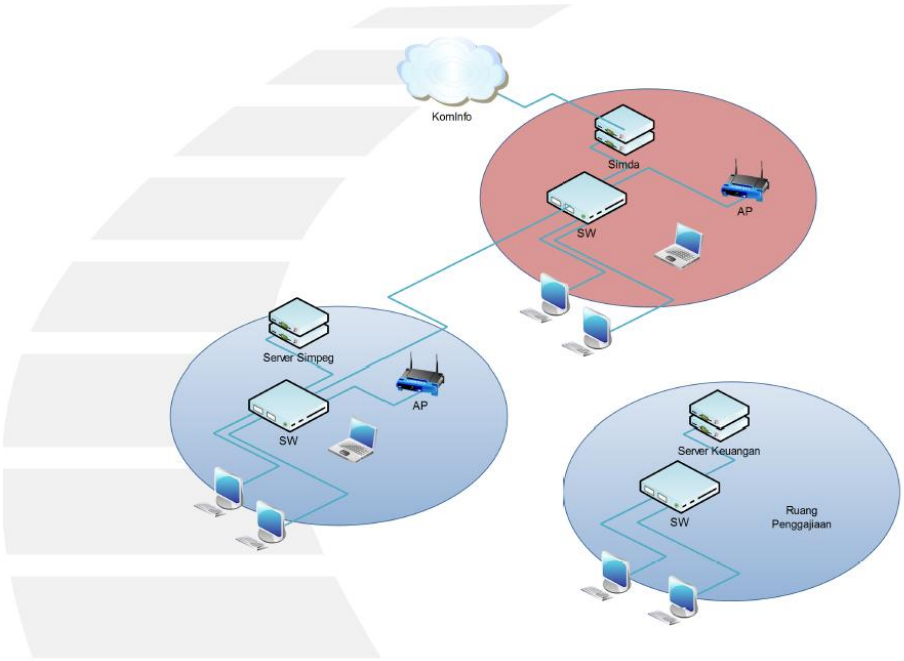
Nama	Aplikasi SIMDA Keuangan
Nama Lengkap	Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah
Kategori	Proses informasi keuangan internal BKD Kota Bandung
Penanggung Jawab/Pengelola	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program
Unit pengguna	Sub Bagian Keuangan dan Program
Deskripsi	Digunakan untuk membantu pengelolaan data keuangan di internal BKD Kota Bandung
Status operasional	Jam kerja (Senin-Jumat)
Waktu Penggunaan	Operasional
Mulai implementasi	2005
Perangkat lunak	Visual Basic, SQL Server
Perangkat keras	PC Standar (Intel)
Network	LAN, WAN, RJ 45, UTP cable
Isu Jangka Panjang	Integrasi dengan aplikasi penggajian dan SIMPEG akan memudahkan pengelolaan data keuangan dan laporan keuangan BKD Kota Bandung.

Tabel IV-6 IRC Aplikasi Sistem Informasi Penggajian

Nama	Aplikasi Sistem Informasi Penggajian
Nama Lengkap	Sistem Informasi Penggajian
Kategori	Proses informasi penggajian internal BKD Kota Bandung
Penanggung Jawab/Pengelola	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program
Unit pengguna	Sub Bagian Keuangan dan Program
Deskripsi	Digunakan untuk membantu pengelolaan data penggajian di internal BKD Kota Bandung
Status operasional	Operasional
Waktu Penggunaan	Jam Kerja (Senin-Jumat)
Mulai implementasi	2005
Perangkat lunak	Visual Basic, SQL Server
Perangkat keras	PC Standar (Intel)
Network	LAN, WAN, RJ 45, UTP cable
Isu Jangka Panjang	Integrasi dengan aplikasi keuangan dan SIMPEG akan memudahkan pengelolaan data kuangan dan laporan keuangan BKD Kota Bandung.

4.3.2. Platform Teknologi

Identifikasi *platform* teknologi merupakan definisi dekomposisi secara hirarkis mengenai jenis-jenis *platform* teknologi yang terdapat dalam suatu *enterprise*. Pada Tabel IV-9 menunjukkan *platform* teknologi di BKD Kota Bandung yang terbagi ke dalam tiga kelompok yaitu perangkat keras, perangkat lunak dan perangkat komunikasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan staf BKD Kota Bandung untuk tipologi jaringan yang saat ini digunakan di BKD Kota Bandung adalah tipologi STAR yang telihat pada gambar IV-2.



Gambar IV-2 Kondisi Eksisting Tipologi Jaringan BKD Kota Bandung

4.3.3. Relasi Aplikasi dengan Fungsi-fungsi Bisnis

Pada tahapan ini aplikasi-aplikasi yang dimiliki BKD Kota Bandung saat ini telah teridentifikasi dan akan direlasikan dengan fungsi-fungsi bisnis yang didukungnya dan juga dengan *platform* teknologi. Tujuan dari tahapan ini adalah mengetahui fungsi-fungsi bisnis yang didukung oleh aplikasi dan aplikasi-aplikasi yang ditunjang oleh teknologi. Aplikasi yang terdefinisi dalam IRC direlasikan dengan fungsi-fungsi bisnis yang didefinisikan dalam pemodelan bisnis. Untuk lebih lengkapnya matriks relasi antara aplikasi dengan tiap fungsi dapat dilihat pada Lampiran C. Pada tahapan ini akan dijelaskan hasil dari matriks antara fungsi dengan aplikasi berupa tabel fungsi yang didukung aplikasi dan tidak didukung aplikasi, penjelasannya dapat dilihat pada tabel IV-7 dan tabel IV-8.

Tabel IV-7 Fungsi Bisnis yang didukung Aplikasi

No	Fungsi	Deskripsi
1.	1.1	Inventarisasi Lowongan Jabatan dalam Formasi
2.	1.4	Penetapan Formasi PNSD
3.	1.6	Penerimaan Berkas lamaran PNSD
4.	1.8	Pengembalian Berkas Lamaran yang tidak memenuhi syarat
5.	1.9	Pengumuman & Penyampaian Nomor Ujian Seleksi Pengadaan PNSD
6.	1.13	Pemberkasan Peserta lulus Seleksi PNSD
7.	1.14	Pemberian Nomor Induk Pegawai

Pemanfaatan aplikasi sampai saat ini belum menyeluruh mendukung semua fungsi bisnis, oleh karena itu perlu direncanakan pengembangan aplikasi untuk mendukung seluruh fungsi bisnis yang ada. Pada tabel IV-8 dijelaskan fungsi bisnis yang memerlukan dukungan aplikasi tetapi belum didukung oleh aplikasi.

Tabel IV-8 Fungsi Bisnis yang tidak didukung Aplikasi

No	Fungsi	Deskripsi
1.	1.2	Penetapan Usulan Kebutuhan Formasi PNSD
2.	1.3	Penyampaian Usulan Kebutuhan Formasi PNSD
3.	1.5	Pembentukan Panitia Ujian Seleksi PNSD
4.	1.7	Pemeriksaan Berkas Persyaratan Adminsitratif
5.	1.10	Pelaksanaan Ujian Seleksi Pengadaan PNSD
6.	1.11	Pemeriksaan Hasil Ujian Seleksi Pengadaan PNSD
7.	1.12	Pengumuman Kelulusan Ujian Seleksi PNSD
8.	1.15	Penyusunan Draft Keputusan Walikota tentang Pengangkatan CPNSD
9.	1.16	Penandatanganan keputusan Walikota tentang Pengangkatan CPNSD
10.	1.17	Penandatanganan Salinan keputusan Walikota tentang Pengangkatan CPNSD
11.	1.18	Penandatanganan Petikan keputusan Walikota tentang Pengangkatan CPNSD
12.	1.19	Penyerahan Petikan Keputusan Walikota tentang Pengangkatan CPNSD
13.	2.1	Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Diklat
14.	2.2	Surat Edaran Pendaftaran Peserta Diklat
15.	2.3	Pengiriman Surat Edaran Peserta Diklat
16.	2.4	Pengiriman Berkas calon Peserta Diklat
17.	2.5	Pembuatan Surat Perintah
18.	2.6	Penandatanganan Surat Perintah
19.	2.7	Pengiriman Surat Perintah (SP) Peserta Diklat Melalui SKPD
20.	2.8	Penyampaian Surat Perintah Mengikuti Diklat kepada Peserta
21.	2.9	Pengiriman Peserta Diklat ke Lembaga Diklat Lain
22.	2.10	Pelaksanaan Diklat di Lembaga Diklat Lain
23.	2.11	Pelaksanaan Diklat secara Swakelola
24.	2.12	Evaluasi dan Pelaporan
25.	3.1	Membuat Surat Edaran proses pengajuan pengangkatan CPNS menjadi PNS
26.	3.2	Pengumpulan berkas persyaratan CPNS menjadi PNS

No	Fungsi	Deskripsi
27.	3.3	Verifikasi kelengkapan berkas persyaratan CPNS menjadi PNS
28.	3.4	Pengiriman usulan pengangkatan CPNS menjadi PNS ditandangani Kepala SKPD
29.	3.5	Pendistribusian berkas usulan CPNS menjadi PNS sesuai tupoksi
30.	3.6	Penelitian Berkas Persyaratan CPNS menjadi PNS
31.	3.7	Penandatangan Surat Pengantar Uji Kesehatan
32.	3.8	Pemeriksaan Kesehatan
33.	3.9	Penerimaan Hasil Pemeriksaan Kesehatan
34.	3.10	Pembuatan Konsep Surat Keputusan Pengangkatan CPNS menjadi PNS
35.	3.11	Penelitian dan Pemeriksaan Surat Keputusan
36.	3.12	Penandatanganan Keputusan Pengangkatan PNS
37.	3.13	Penandatanganan Salinan Keputusan Pengangkatan CPNS menjadi PNS
38.	3.14	Pemeriksaan Petikan Surat Keputusan
39.	3.15	Penandatanganan Petikan Keputusan Pengangkatan CPNS menjadi PNS
40.	3.16	Penyampaian Petikan Keputusan kepada ybs melalui SKPD dan instansi terkait

4.3.4. Relasi Aplikasi dengan Platform Teknologi

Setiap aplikasi dijalankan di atas landasan teknologi tertentu sehingga identifikasi dan dokumentasi landasan teknologi yang digunakan serta keterhubungannya dengan tiap aplikasi menjadi penting dalam IRC. Relasi aplikasi dengan *platform* teknologi tingkat terendah atau detail bertujuan untuk melihat penggunaan sumber daya teknologi oleh suatu aplikasi. Relasi tersebut ditampilkan dalam bentuk matriks relasi seperti yang terdapat pada tabel IV-9. Dari matriks aplikasi dengan *platform* teknologi maka dapat diketahui apakah sumber daya teknologi telah digunakan secara optimal atau bahkan tidak pernah digunakan oleh suatu aplikasi.

Melihat Tabel IV-9 dapat diperhatikan bahwa terdapat satu Aplikasi yang dibuat dengan *PostgreSQL* dan dua aplikasi yang dibuat dengan *Delphi* dan *Visual Basic*. Dukungan teknologi jaringan bagi sistem aplikasi menggunakan dua buah *database server* yang digunakan untuk mengelola data kegiatan, semua aplikasi menggunakan protokol TCP/IP pada kapasitas transfer data 10/100 Mbps.

Sistem dibuat terpusat dimana *server* bertindak sebagai penyedia layanan pengaksesan terhadap data, sedangkan *user interface* dan *bussiness logic* disimpan pada masing-masing *client*. Sistem operasi untuk masing-masing *server* adalah Linux sedangkan sistem operasi untuk *client* menggunakan Windows XP. Beberapa sumber daya seperti *scanner* dan *printer* dapat digunakan secara bersama-sama oleh bagian lain dalam suatu ruangan.

Semua aplikasi yang ada satu sama lain berbagi sumber daya teknologi dan seharusnya dapat saling berbagi informasi, yaitu aplikasi SIMPEG, SIMDA Keuangan, dan Sistem Informasi Penggajian. Semua aplikasi tersebut disimpan pada masing-masing *client*. Masing-masing *client* menampung *logic* aplikasi dan juga *user interface* untuk kemudian mereka saling menyimpan data di *server*. Namun data dan aplikasi tersebut disimpan pada *server* yang berbeda, pengelola basis data yang menggunakan aplikasi tidak dapat saling berkomunikasi satu sama lain dikarenakan perbedaan *platform*.

Tabel IV-9 Matriks Aplikasi dengan Teknologi

APLIKASI / TEKNOLOGI	SIMPEG	SIMDA KEUANGAN	SISTEM INFORMASI PENGGAJIAN
PERANGKAT KERAS			
PC SERVER	✓	✓	✓
PC CLIENT	✓	✓	✓
MOUSE	✓	✓	✓
KEYBOARD	✓	✓	✓
SCANNER	✓	✓	✓
MONITOR	✓	✓	✓
PRINTER	✓	✓	✓
HARDISK	✓	✓	✓
COMPACT DISK	✓	✓	✓
REMOVEABLE DISK	✓	✓	✓
PERANGKAT LUNAK			
LINUX	✓		
MICROSOFT WINDOWS XP		✓	✓
POSTGRESQL	✓		
SQL SERVER		✓	✓
DELPHI		✓	
VISUAL BASIC			✓
PHP	✓		
PERANGKAT KOMUNIKASI			
LAN	✓		
WAN	✓		
TELEPHONE DAN FAXIMILE			
HUB	✓	✓	✓
MODEM ROUTER	✓	✓	✓
SWITCH			
ACCESS POINT	✓	✓	✓
KABEL JARINGAN DAN RJ45		✓	✓

4.3.5. Hasil Analisis Kondisi BKD Kota Bandung

Core business BKD Kota Bandung adalah Kepegawaian, hal tersebut dapat dilihat pada rantai nilai Porter bahwa fungsi bisnis utama adalah kegiatan-kegiatan kepegawaian mulai dari Pengadaan CPNSD, Pendidikan dan Pelatihan dan Pengangkatan CPNSD menjadi PNSD. Kegiatan utama tersebut didukung

oleh kegiatan pendukung seperti manajemen infrastruktur, manajemen sumber daya manusia dan manajemen keuangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan Bagian Umum, BKD Kota Bandung belum memiliki bagian khusus yang melakukan pengembangan SI dan kebijakan SI dikembangkan berdasarkan kebutuhan temporer tanpa adanya perencanaan SI secara strategik sehingga akibatnya SI tidak dapat memberikan manfaat yang bersifat menyeluruh bagi fungsi bisnis pada organisasi dan teknologi belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Pengelolaan SI dilakukan secara independen oleh masing-masing bagian pada unit-unit organisasi untuk memenuhi kebutuhan suatu fungsi bisnis yang mendesak saat itu (temporer). Pengelolaan SI yang dilakukan secara independen ini menyebabkan perbedaan pada spesifikasi perangkat keras dan *platform* perangkat lunak di masing-masing bagian yang mengelola fungsi bisnis.

Berdasarkan hasil analisis dan informasi mengenai aplikasi pada IRC (tabel IV-4 sampai IV-6) terdapat tiga kelompok aplikasi yang masing-masing adalah aplikasi untuk mendukung fungsi layanan akses informasi kepegawaian, informasi keuangan internal dan penggajian.

Perbedaan bahasa pemrograman dan *platform* terutama sistem operasi pada komputer *client* dengan komputer server menjadikan aplikasi-aplikasi berdiri sendiri untuk melayani suatu fungsi bisnis kepegawaian, keuangan, penggajian, dan tidak dapat saling bertukar data sebagai satu kesatuan.